

54

## Dokumen

# Membangun Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik

*Tim Departemen Hubungan Internasional*

### I. PERTEMUAN KERJA SAMA EKONOMI ASIA PASIFIK (APEC) KE-5

- A. Pertemuan SOM APEC
- B. Pertemuan APEC ke-5

### II. PERSIAPAN PERTEMUAN APEC KE-6

- A. Pertemuan SOM APEC
- B. Pertemuan Menteri Keuangan APEC

Berakhirnya era Perang Dingin telah memunculkan persoalan baru di kawasan Pasifik, yaitu bagaimana kawasan ini harus mengatur dirinya dengan adanya perubahan-perubahan global di bidang keamanan dan politik. Upaya negara-negara di kawasan Pasifik untuk mengatur diri mereka adalah dengan membangun kerja sama dalam bidang ekonomi. Kerja sama dalam bidang ini menempati posisi penting dalam kebijaksanaan negara-negara di kawasan. Salah satu gagasan kebijaksanaan dalam bidang ekonomi ini adalah membangun institusi regional yang didasarkan atas hubungan multilateral. Tetapi proses pembentukan institusi demikian kelihatannya berjalan agak lambat, meskipun telah ada upaya ke arah itu, misalnya APEC. APEC dianggap sebagai forum yang paling tepat bagi kawasan Pasifik untuk mengelola masalah-masalah ekonomi kawasan.

APEC tidak hanya bersifat multilateral karena ia melibatkan banyak peserta, tetapi juga modular karena ia melibatkan berbagai pelaku yang berbeda sesuai dengan masalah yang ditangani. Lebih dari itu, kepemimpinan dalam APEC cenderung bersifat luwes dan tidak bersifat hegemonis. Dalam arti kepemimpinan APEC disesuaikan dengan masalah-masalah yang dihadapi.

APEC menjadi berita utama dalam surat kabar pada akhir tahun 1993 ketika ia mengadakan pertemuan di Seattle, Amerika Serikat. Pertemuan Seattle ini mempertegas APEC sebagai forum kerja sama ekonomi yang paling cocok untuk Asia Pasifik. Meskipun tidak mengeluarkan suatu keputusan konkret mengenai kelembagaan APEC, pertemuan APEC kelima tersebut telah meletakkan landasan baru yang memberi inspirasi bagi kelangsungan APEC.

Pertemuan Seattle tersebut juga memutuskan Indonesia sebagai tuan rumah Pertemuan APEC keenam tahun 1994. Keputusan ini tidak hanya dipandang sebagai keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia, tetapi juga pengakuan bahwa sebagai anggota ASEAN Indonesia mampu memainkan peran penting dalam membangun kerja sama ekonomi Asia Pasifik.

Ringkasan Peristiwa edisi ini akan menyajikan beberapa berita utama mengenai Pertemuan APEC kelima dan berita-berita mengenai persiapan Pertemuan APEC keenam di Jakarta bulan November 1994.

## I. PERTEMUAN KERJA SAMA EKONOMI ASIA PASIFIK APEC KE-5

### A. PERTEMUAN SOM APEC

Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (*Senior Official Meeting - SOM*) APEC berlangsung di Seattle, AS, tanggal 14-16 November 1993 dihadiri oleh 15 negara dari ASEAN, AS, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, Cina, Hongkong dan Taiwan untuk membahas laporan Kelompok Para Pakar (*eminent persons groups - EPG*), *economic trends and issues* (ETI), anggaran APEC, dan laporan Direktur Eksekutif Sekretariat APEC di Singapura, *Dr. William Boddee*.

Rekomendasi Kelompok Para Pakar kepada Konpersi Tingkat Menteri (KTM) tentang Konsep Masyarakat Ekonomi Asia Pasifik dan ide pembentukan kawasan perdagangan bebas (*free trade area*) sebagai tindak lanjut APEC belum bisa diterima. Rekomendasi tersebut dipandang masih terlalu dini karena tingkat kemajuan ekonomi di kalangan anggota APEC belum seimbang. Akan lebih baik bila sesama anggota APEC meningkatkan kerja sama untuk mengurangi perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi di antara mereka (*Kompas*, 20-11-1993).

Menlu *Ali Alatas* mengatakan bahwa: (1) terminologi masyarakat ekonomi atau yang juga diistilahkan komunitas ekonomi masih mengundang berbagai penafsiran. Ada yang menganggap kata komunitas dapat dipakai sejauh tidak mempunyai implikasi teknis, tapi ada pula yang keberatan karena implikasinya sangat luas seperti penyeragaman kriteria, standardisasi, dan sistem pabean; (2) langkah ke arah pembentukan perdagangan bebas sebagai persiapan pelembagaan APEC, terlalu dini, tanpa merinci alasannya. Indonesia dan anggota ASEAN lainnya belum siap menerima konsep komunitas ekonomi bila kata itu diartikan sama dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Economic Community - EEC*). Terminologi Masyarakat Ekonomi Eropa mempunyai pengertian integrasi ekonomi pasar, dan pelaksanaan harmonisasi dalam kebijaksanaan ekonomi, termasuk standardisasi produk (*Kompas*, 20-11-1993).

Sementara itu Menlu AS, *Warren Christopher* mengatakan bahwa: (1) APEC perlu diembagakan untuk mempercepat peningkatan perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik; (2) harmonisasi langkah-langkah APEC adalah penting. Sejalan dengan hal ini, AS

mengusulkan untuk lebih melibatkan sektor swasta; (3) AS tetap menekankan pentingnya pelaksanaan sistem perdagangan dan investasi terbuka, meningkatkan kerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah regional, seperti energi dan lingkungan, pemererat jalinan kerja sama regional dan meningkatkan infra struktur pembangunan (*Kompas*, 20-11-1993).

Presiden Soeharto mengatakan bahwa: (1) keikutsertaan Indonesia dalam APEC bukan berarti meninggalkan Gerakan Nonblok (GNB), atau mengabaikan cita-cita GNB. Sebaliknya, kepemimpinan Nonblok akan mendapat perhatian; (2) APEC diharapkan dapat mengembangkan dialog yang konstruktif antara negara industri maju dan negara membangun. Di dalam APEC ada tiga negara industri maju anggota G7, yaitu AS, Kanada dan Jepang; (3) masa depan APEC penting karena di kawasan Asia Pasifik terletak kemungkinan dikembangkannya kerja sama di bidang ekonomi; (4) APEC perlu dikembangkan secara berhati-hati, dan hendaknya memberi manfaat untuk lingkungan APEC dan bagi semua negara di kawasan lainnya (*Kompas*, 21-11-1993).

KTM sepakat untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan barang, jasa, investasi, dan administrasi, serta meningkatkan akses ke data mengenai tarif di negara-negara APEC tanpa keluar dari prinsip GATT.

Kesepakatan bersama yang tertuang dalam Deklarasi Kerangka Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Asia Pasifik (*Declaration on an Asia Pacific Economic Cooperation Trade and Investment Framework*) berisi: (1) rumusan tentang pembentukan kelompok kerja APEC untuk bidang telekomunikasi, pariwisata, konservasi sumber daya kelautan dan teknologi; (2) putusan untuk mengembangkan APEC dengan prinsip "regionalisme terbuka" dan sistem pasar yang mengarah pada interdependensi ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Hal itu diperlukan karena masa depan APEC ditantang oleh lajunya perdagangan dan investasi regional, tantangan mana hanya bisa dihadapi dengan meningkatkan kerja sama, termasuk penyediaan fasilitas; (3) pengakuan APEC bahwa prinsip GATT tetap merupakan landasan sistem perdagangan dan kerja sama ekonomi APEC; (4) prinsip kerja sama APEC, yang tetap berpegang pada prinsip perdagangan multilateral yang bebas; (5) keyakinan para menteri untuk mendemonstrasikan visi interdependensi APEC pada komunitas perdagangan dan investasi global; (6) peranan APEC untuk mewakili kepentingan bersama kawasan Asia Pasifik dengan tetap

mengikuti prinsip umum perdagangan dan investasi GATT; (7) sikap APEC untuk mempertahankan semangat dialog terbuka, dan membangun konsensus dengan tetap menghargai pandangan tiap anggota; (8) kesepakatan mengenai Ketua KTM selanjutnya, yaitu tahun 1994: Indonesia, tahun 1995: Jepang, tahun 1996: Filipina, dan tahun 1997: Kanada; (9) keputusan menerima Chili, Meksiko dan Papua Nugini sebagai anggota APEC, namun Chili baru dapat mengikuti kegiatan APEC tahun 1994 saat kepemimpinan berada di bawah Indonesia. Sedangkan Meksiko dan Papua Nugini sudah dapat langsung mengikuti kegiatan APEC; (10) dukungan untuk menyukseskan Putaran Uruguay mengingat kontribusinya yang penting bagi pertumbuhan dan kemajuan dunia (*Kompas*, 21-11-1993).

Selain kesepakatan bersama, KTM juga mengeluarkan deklarasi terpisah tentang Putaran Uruguay, program kerja perdagangan dan investasi APEC 1994.

## B. PERTEMUAN APEC KE-5

Pertemuan para pemimpin APEC ke-5 di Seattle yang didahului dengan Pertemuan SOM tidak mengeluarkan suatu putusan konkret tentang bentuk, struktur dan kelembagaan APEC. Mereka hanya merumuskan pandangan bersama yang mempunyai jangkauan ke depan sekurang-kurangnya memberi inspirasi bagi kelangsungan APEC. Pandangan itu berupa Pernyataan Visi Ekonomi (*Economic Vision Statement*) sebagai berikut: (1) komitmen untuk menciptakan masa depan yang stabil dan makmur bagi rakyat di kawasan Asia Pasifik dengan memperkuat landasan kerja sama ekonomi; (2) Pertemuan Tingkat Tinggi APEC tahun 1994 berlangsung di Jakarta; (3) landasan pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik adalah sistem perdagangan multilateral yang terbuka. Peningkatan partisipasi anggota APEC dalam sistem GATT dapat meningkatkan kerja sama kawasan; (4) keberhasilan pembangunan di Asia Pasifik merupakan hasil kemampuan masyarakat di kawasan ini dalam mengadaptasi cepatnya perkembangan; (5) masyarakat ekonomi Asia Pasifik perlu tumbuh dalam semangat keterbukaan dan kemitraan; (6) berbagai hambatan perdagangan dan investasi akan terus dikurangi untuk memperlancar lalu lintas barang, jasa, modal dan investasi di kalangan anggota APEC; (7) perlu memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan melek huruf, memacu sistem pendidikan keterampilan; (8) perlu perbaikan telekomunikasi dan transportasi untuk mengurangi hambatan waktu dan ruang, sehingga

mobilitas barang dan manusia dapat berlangsung cepat dan efisien; (9) perlu tercipta lingkungan Asia Pasifik yang semakin baik dengan menjaga kualitas udara, air dan kawasan hijau. Sumber-sumber energi dan daya dimanfaatkan untuk menjamin pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan dan menjamin masa depan yang lebih aman bagi rakyat Asia Pasifik; (10) APEC agar memperluas dialog ekonominya untuk memajukan proyek-proyek kerja yang khusus. Semangat kewirausahaan dan kebijaksanaan yang berorientasi pasar, yang telah mendorong dinamika ekonomi, akan terus diperkokoh dalam APEC; (11) menerima rekomendasi Kelompok Para Pakar yang menganjurkan perdagangan bebas di Asia Pasifik, memajukan liberalisasi perdagangan global dan meluncurkan program-program nyata; (12) pertemuan para Menteri Keuangan APEC berlangsung tahun 1994, untuk mengkonsultasikan isu-isu ekonomi secara luas, termasuk perkembangan ekonomi makro dan arus modal; (13) dunia usaha agar membentuk Forum Bisnis Pasifik untuk mengidentifikasi isu-isu yang dihadapi APEC guna memperlancar perdagangan dan investasi kawasan, serta mendorong pengembangan jaringan bisnis regional; (14) sepakat untuk melakukan investasi bagi generasi mendatang di kawasan Asia Pasifik melalui pembentukan Program Pendidikan APEC; (15) sepakat untuk membentuk Program Sukarela Bisnis APEC (*APEC Business Volunteer Program*) untuk mendorong kerja sama dalam bidang sumber daya manusia, pertukaran keterampilan manajemen dan teknik, serta pengembangan usaha kecil dan menengah (*Kompas*, 22-11-1993).

## II. PERSIAPAN PERTEMUAN APEC KE-6

### A. PERTEMUAN SOM APEC

Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi APEC (SOM APEC) berlangsung di Jakarta tanggal 2-4 Februari 1994, dihadiri oleh 17 anggota APEC, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Jepang, AS, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, RRC, Australia, Selandia Baru, Kanada, Meksiko dan Papua Nugini.

Dirjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri, *Wisber Loeis*, mengatakan dalam jumpa pers bahwa: (1) SOM menyepakati program yang akan dilaksanakan di Indonesia pada bulan-bulan yang akan datang, yaitu: (a) memutuskan Indonesia untuk menyelenggarakan simposium bea dan cukai bersamaan dengan Konperensi

Tingkat Menteri (KTM) bulan November 1994; (b) Indonesia akan menyelenggarakan Pertemuan Kelompok Ahli Bidang Usaha Kecil dan Menengah (*Expert Meeting on Small and Medium Scale Enterprises*) sebagai persiapan KTM; (2) SOM I merupakan persiapan KTM VI APEC dan Pertemuan Informal II Para Pemimpin APEC, yang akan berlangsung di Indonesia pada bulan November 1994; (3) para peninjau antara lain dari Sekretariat ASEAN dan *Pacific Economic Cooperation Council* (PECC); (4) SOM II akan berlangsung di Bali pada tanggal 16-20 Mei 1994, SOM III bulan Oktober 1994 dan SOM IV pada bulan November 1994; (5) pelaksanaan instruksi para Menlu agar SOM merumuskan saran bagi Kelompok Para Pakar untuk melaksanakan tugasnya di tahun 1994; (6) SOM telah menghasilkan operasionalisasi Komite Anggaran dan Administrasi (*Budget and Administrative Committee - BAC*) (*Suara Pembaruan*, 5-2-1994).

#### B. PERTEMUAN MENTERI KEUANGAN APEC

Pertemuan pertama para Menteri Keuangan Anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) berlangsung di Honolulu, AS tanggal 18-19 Maret 1994 untuk membahas tentang bagaimana negara-negara di Asia Pasifik bisa terus tumbuh dan mempertahankan apa yang sudah dicapai di bidang ekonomi dan bagaimana negara-negara di kawasan Asia Pasifik mampu memobilisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Menteri Keuangan AS, Llyod Bentsen, selaku Ketua Forum Pertemuan Menkeu APEC mengatakan kepada wartawan bahwa: (1) para Menteri Keuangan APEC menyetujui penyelenggaraan pertemuan lanjutan di Indonesia pada tahun 1995 untuk membahas masalah pengembangan ekonomi regional, strategi pertumbuhan ekonomi, berbagai masalah makro ekonomi, arus perpindahan modal di kawasan Asia Pasifik, serta kebijaksanaan dan pengembangan sektor keuangan; (2) per-

temuan membicarakan masalah tantangan ekonomi yang akan dihadapi di kawasan Asia Pasifik, yaitu bagaimana mempertahankan pertumbuhan dengan inflasi yang rendah, upaya pengembangan infrastruktur dan pembiayaan investasi, serta upaya mendorong pengembangan pasar modal; (3) pertumbuhan ekonomi yang baik di kawasan Asia Pasifik akan membawa hasil bagi masing-masing negara APEC dan juga bagi dunia ekonomi secara keseluruhan; (4) ada beberapa prinsip dalam membuat kebijaksanaan: (a) negara-negara APEC diminta menerapkan kebijaksanaan makro ekonomi yang hati-hati dengan mengupayakan tingkat inflasi yang rendah sebagai dasar untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan; (b) peningkatan lalu lintas barang, jasa dan investasi antar negara merupakan pilar penting bagi tercapainya perekonomian di kawasan Asia Pasifik; (c) sektor swasta menjadi motor utama dari pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik; (d) mobilisasi dana sangat dibutuhkan dalam mendukung investasi swasta dan pembangunan infrastruktur, membantu diversifikasi sumber-sumber pendanaan, mengurangi *cost of capital*, dan membantu pengembangan pasar modal; (e) perumusan kebijaksanaan yang mendorong arus dana yang lebih banyak untuk masuk ke suatu negara melalui investasi langsung (*Foreign Direct Investment - FDI*) terbukti mampu memberikan kontribusi yang positif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi; (f) para Menkeu APEC setuju untuk meningkatkan arus modal dan surat berharga bagi investasi di antara negara APEC; (g) sepakat untuk bekerjasama dalam memajukan pasar-pasar modal domestik sebagai sumber pembiayaan bagi proyek infrastruktur jangka panjang; (h) menyambut baik upaya yang dilakukan Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, *International Finance Corporation* (IFC), dan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk membantu pengembangan pasar uang; (i) mendorong agar lembaga-lembaga keuangan tersebut melanjutkan strategi yang sudah diterapkan untuk membantu pendanaan perusahaan kecil dan menengah (*Kompas*, 21-3-1994).

## Timbangan Buku

### Operasi Perdamaian PBB: Tantangan di Masa Depan

*Peacekeeping: Challenges for the Future*, Hugh Smith (ed.), Canberra: Australian Defence Studies Centre, Australian Defence Force Academy, 1993, xiv + 229 hal. ISBN 0 7317 0274 3.

**B**ERAKHIRNYA Perang Dingin telah mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kembali memainkan peran dan fungsi utama dalam politik internasional. Meningkatnya peran lembaga dunia ini antara lain terlihat dari meningkatnya jumlah operasi perdamaian (*peacekeeping operations*) yang diluncurkan selama tahun 1990-1993, serta dari perubahan dan perbaikan kualitatif yang mengikuti operasi-operasi perdamaian yang baru tersebut. Seperti yang dilakukan di Kamboja, operasi perdamaian PBB tidak lagi terpaku pada konsep operasi lama, yaitu mengawasi gencatan senjata, tetapi melibatkan banyak kegiatan baru seperti: pemulangan para pengungsi, pengawasan dan penegakan hak-hak asasi manusia, pelaksanaan pemilihan

umum, serta rekonstruksi dan rehabilitasi ekonomi.

Mengikuti evolusi di atas, pembahasan mengenai peran dan kedudukan baru PBB-pun berkembang menjadi topik utama dalam banyak seminar internasional serta penerbitan ilmiah selama tahun 1992-1993. Buku *Peacekeeping: Challenges for the Future* ini merupakan salah satu dari sekian banyak buku-buku baru yang terbit dalam rangka menyambut "kebangkitan" PBB ini. Seperti pembahasan lainnya, buku ini pun pada intinya mendukung kembalinya PBB sebagai aktor utama dalam percaturan politik dunia, perdamaian pada khususnya.

Dalam konteks ini, harus diakui bahwa Australia telah memainkan peran aktif. Buku ini sendiri, misalnya, terbit sebagai tindak lanjut dari sebuah seminar internasional yang diprakarsai oleh Angkatan Bersenjata Australia pada bulan Juni 1993. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Gareth Evans telah menerbitkan "buku biru"-nya: *Cooperating for Peace*, yang juga menyoroti pe-

ran serta kedudukan PBB di masa pasca Perang Dingin. Dalam kesempatan lain, Australia telah memprakarsai "The Canberra Seminar" yang secara khusus diadakan untuk membahas perubahan-perubahan drastis di seputar PBB.

Sebagai produk kalangan militer, tidaklah mengherankan kalau buku ini lebih memperhatikan aspek militer dan operasional dari operasi perdamaian, dengan pengalaman dan keterlibatan kontingen Australia sebagai salah satu acuan dasar utamanya. Namun, ini tidak berarti bahwa hal-hal yang bersifat non-militer ataupun non-Australia dikesampingkan begitu saja. Salah satu kelebihan dari buku ini adalah disertakannya analisis teoretis-konseptual, dan juga tulisan-tulisan mengenai pengalaman negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Tulisan Cathy Downes, misalnya, menyoroti tantangan yang dihadapi oleh negara-negara kecil dalam partisipasinya di operasi perdamaian yang baru. Analisis Downes ini beranjak dari konsep *second generation peacekeeping operation* yang diajukan oleh John McKinlay and Jarat Chopra yang pada intinya menekankan perubahan dalam sifat-sifat dasar operasi perdamaian, terutama dalam kecenderungan mempergunakan kekuatan dan kekerasan. Dari sini, Downes berkesimpulan bahwa negara-negara kecil, seperti misalnya Selandia Baru, perlu mengkaji kembali keseluruhan *force structures* yang ada, termasuk doktrin dan kesiapan operasionalnya, sehingga keterlibatan mereka dalam operasi militer PBB tidak mengganggu kepentingan agenda keamanan nasional masing-masing.

Analisis Cathy Downes ini sesungguhnya menarik untuk dikembangkan dan dikaji secara lebih mendalam. Sayangnya, penekan-

an buku ini terlalu dititik beratkan pada pembahasan praktis-operasional sehingga momentum dan landasan teoretis-konseptual yang telah dikembangkan oleh Downes ini tidak dikembangkan sebagaimana mestinya di dalam bab-bab selanjutnya.

Menutupi kekurangan ini, ulasan singkat yang menyetengahkan pengalaman dan keterlibatan negara Asia Pasifik lainnya, yaitu Fiji, Indonesia, Singapura dan Thailand, yang ditulis oleh perwira militer dari negara-negara yang bersangkutan telah membantu memberikan perspektif tambahan yang penting dan menarik bagi buku ini. Ditambah dengan uraian mengenai pengalaman Australia sendiri, tulisan-tulisan ini sekurangnya dapat menggambarkan besarnya inisiatif, kesiapan, serta komitmen dari negara-negara Asia Pasifik dalam membantu misi-misi perdamaian PBB di lapangan.

Yang agak disayangkan adalah bahwa tulisan-tulisan dari negara tersebut di atas masih terkesan terlalu "formal" dan sama sekali tidak menyinggung atau membahas kemungkinan koordinasi dan kerja sama secara regional.

Di luar pembahasan di atas, dua tulisan lain yang menarik untuk diperhatikan adalah analisa mengenai keterlibatan Polisi (*Civilian Police*) oleh Peter MacAulay serta perspektif dari media massa yang ditulis oleh Graeme Dobell. Masing-masing topik ini, dalam kapasitasnya tersendiri, mewakili elemen-elemen penting yang peran dan kedudukannya dalam misi perdamaian sedang berkembang dengan pesat sesuai dengan evolusi operasi perdamaian itu sendiri.

Keterlibatan *Civilian Police* sesungguhnya telah dimulai dengan operasi perdamaian di Cyprus (UNFICYP, 1964). Namun kontribusi dari keterlibatan dan peran mere-

ka baru terlihat menonjol dalam operasi-operasi perdamaian kontemporer, seperti UNTAG di Namibia dan UNTAC di Kamboja. MacAulay berpendapat bahwa fungsi dan peranan *Civilian Police* ini masih belum sepenuhnya didayagunakan dan karenanya harus terus dikembangkan -- seperti kontingen militer -- sehingga dapat menjadi elemen andalan yang dapat memberikan perlindungan bagi anggota-anggota lainnya di lapangan.

Dalam semua proses dan kegiatan ini, pengaruh dan keterlibatan media massa tidak dapat diabaikan. Malahan, "*CNN Factor*" sekarang ini telah berkembang menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan yang penting, termasuk juga dalam pengiriman pasukan ke suatu medan operasi, karena kedekatan serta kekuatannya dalam membentuk pandangan umum (*public opinion*). Dari pengamatannya terhadap kasus-kasus Perang Dunia II, Perang Vietnam, Malvinas, dan juga Perang Teluk, Graeme Dobell berkesimpulan bahwa pengalaman dalam operasi perdamaian telah membantu mengubah terjalannya hubungan kerja yang baik sehingga para peliput berita kini tidak perlu untuk "dijauhkan" lagi. Dari sini, Dobell kemudian berpendapat bahwa media massa dapat memainkan peran yang cukup penting, yaitu sebagai fasilitator.

Secara keseluruhan, buku *Peacekeeping: Challenges for the Future* ini merupakan buku yang penting dan menarik untuk dibaca. Usaha menuju perdamaian, seperti melalui *Peacekeeping*, bukanlah suatu tugas dan tanggung jawab yang mudah. Apalagi kalau pada kenyataannya pihak-pihak yang bertikai ternyata tidak peduli pada niat baik kita. Ditambah lagi dengan besarnya harapan dan sorotan kalangan masyarakat internasional, seperti kasus Bosnia, maka kedudukan dan peran yang dijalankan PBB sebagai penjaga perdamaian global bukanlah sesuatu yang membuat kita menjadi iri. Buku ini membantu memahami masalah dan tantangan yang dihadapi PBB dalam mencoba mengatasi kesulitan-kesulitan dunia saat ini.

Sebagai catatan akhir perlu dikemukakan bahwa *bias* yang mungkin timbul karena penekanan utamanya pada pengalaman dan keterlibatan kontingen Australia tidaklah mengurangi kegunaan buku ini. Sebaliknya, dengan mengetahui inisiatif, pengalaman dan kesiapan Australia, kita dapat secara lebih konkret mengantisipasi dan kemudian memusatkan perhatian pada peranan dan kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak atau belum tercakupi.

A.K.P. Mochtan